

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang dengan populasi terbesar keempat di dunia. Seperti negara berkembang pada umumnya, Indonesia memiliki masalah sosial ekonomi dalam hubungan perekonomian masyarakat. Banyaknya jumlah penduduk yang besar tidak diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan penyediaan lapangan kerja, maka hal ini dapat menimbulkan berbagai masalah ekonomi dan sosial.¹ Adapun salah satu dampak sosial ekonomi yang paling menakutkan adalah pengangguran yang berdampak signifikan pada ekonomi dan masyarakat.²

Pengangguran merupakan situasi di mana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan, tetapi belum berhasil memperoleh pekerjaan.³ Pengangguran biasanya disebabkan oleh jumlah

¹ Rubijanto, S, *Intelijen Ekonomi Teori dan Aplikasi*. (Jakarta: PT Gramedia, 2012), h. 234.

² Budi Hartanto Trianggono dan Siti Umajah Masjkuri, "Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, Upah Minimum dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Jumlah Pengangguran di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2014," *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, Juni 2017 Vol. 2 No. 1, h. 21-30.

³ Dwi Mahroji dan Iin Nurkhasanah, "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Banten," *Jurnal Ekonomi-Qu*, Vol. 9 No. 1 (April, 2019) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten, h. 58.

pekerja yang tidak sebanding dengan jumlah pekerjaan yang tersedia dan mampu dipenuhi.⁴ Pengangguran dapat digunakan sebagai ukuran kualitas pembangunan ekonomi suatu negara atau daerah. Jumlah pengangguran yang tinggi menunjukkan bahwa ekonomi daerah tersebut belum berjalan dengan baik. Hasil dari ketidakseimbangan antara jumlah orang yang bekerja dan jumlah lowongan yang tersedia yang akibatnya angkatan kerja belum terserap sepenuhnya untuk mendapatkan pekerjaan.

Pemerintah harus menghindari pengangguran karena dapat menyebabkan masalah ekonomi, kriminalitas, dan masalah sosial lainnya. Jika angka pengangguran rendah, kehidupan masyarakat negara akan lebih baik, begitu pula sebaliknya.⁵ Pengangguran sebagai salah satu masalah utama yang harus diatasi di Provinsi Banten karena tingginya tingkat pengangguran dapat menunjukkan kualitas perekonomian sebuah daerah yang rendah. Dalam hal menurunkan tingkat pengangguran, Banten masih merupakan salah satu provinsi paling sulit di Indonesia.⁶

⁴ Reni Helvira dan Endah Putria Rizki, "Pengaruh Investasi, Upah Minimum dan IPM terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Kalimantan Barat," *E-Jurnal IAIN Pontianak*, Vol. 1 No. 1 (2020) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pontianak, h. 55.

⁵ Anggia Lestari Lubis dan Murtala, "Pengaruh Upah Minimum dan Pengangguran terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh," *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, Vol. 4 No. 3 (Desember, 2021) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh, h. 28.

⁶ Muhammad Ernanda, Manutun Parulian Hutagaol dan Zulva Azijah, "Pengangguran di Provinsi Banten: Determinan dan Alternatif Kebijakannya," *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, Vol. 29 No. 2 (2021) Fakultas Ilmu Ekonomi Institut Pertanian, h. 131.

Semakin tinggi angka pengangguran akan menimbulkan dampak buruk pada perekonomian dan kondisi sosial di masyarakat. Indikator yang paling umum digunakan untuk menghitung tingkat pengangguran disebut tingkat pengangguran terbuka.⁷ Menurut Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran terbuka ialah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Lebih sedikitnya pekerjaan dari pada lebih banyak orang yang ingin bekerja, yang mengakibatkan pengangguran terbuka. Akibatnya jumlah orang yang tidak memiliki pekerjaan akibatnya semakin meningkat.⁸ Kondisi seperti ini yang memungkinkan seseorang tidak melakukan pekerjaannya dengan jangka waktu yang cukup lama, yang mengakibatkan mereka menganggur separuh waktunya dan disebutnya sebagai pengangguran terbuka.

Pengangguran di mana individu sama sekali tidak memiliki pekerjaan disebut pengangguran terbuka. Provinsi Banten adalah salah satu dari banyak provinsi di Indonesia yang menghadapi masalah pengangguran terbuka yang cukup tinggi. Provinsi Banten merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terletak paling barat di Pulau Jawa berbatasan langsung

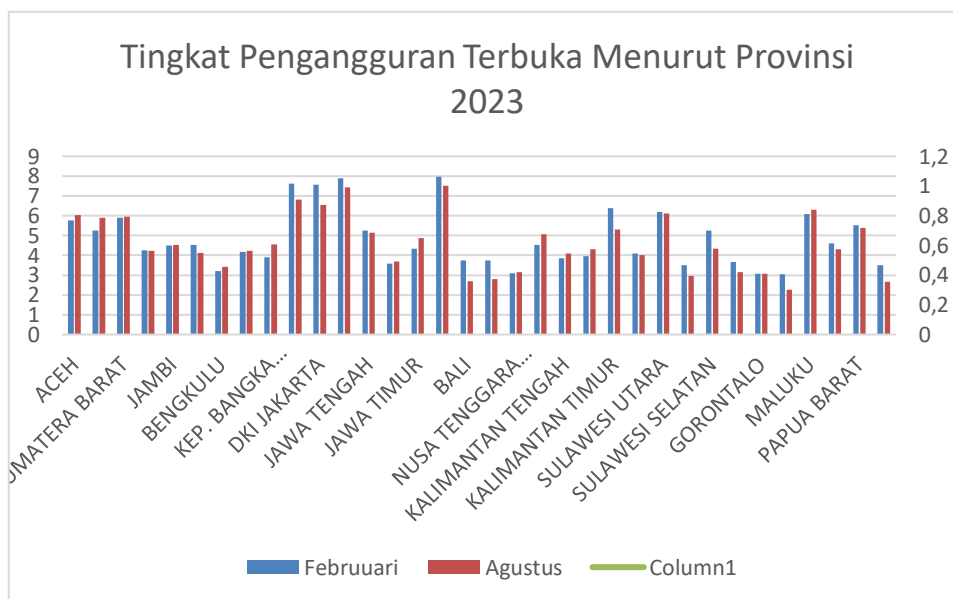
⁷ Widyah Khoirun Nisa, dikutip dalam Hartanto dan Masjkuri, "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengangguran pada Daerah TPT Tinggi dan Daerah TPT Rendah, Studi pada 38 Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2015," *Jurnal Ilmiah*, (2017), h. 27.

⁸ Amsah Hendri Doni, Fifa Alfiona, Wira Andespa dan Al-Amin, "Pengangguran Dalam Perspektif Islam dan Konvensional," *Jurnal Ilmiah Ekonom, Manajemen dan Syariah*, Vol. 2 No. 3 (Desember 2023) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, h. 3.

dengan Pulau Sumatra dan DKI Jakarta. Ironisnya dengan demografi potensi ekonomi yang besar tidak menjamin Provinsi Banten lepas dari tingginya tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran di provinsi ini memiliki tingkat pengangguran terbuka lebih tinggi dari pada provinsi lainnya.⁹

Berdasarkan data yang diterbitkan oleh BPS, pada tahun 2023 menunjukkan keadaan tingkat pengangguran terbuka di Indonesia yang mengalami fluktuasi. Data perkembangan tingkat pengangguran terbuka dapat dilihat melalui grafik berikut ini:

Grafik 1.1



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Banten

⁹ Muhammad Diaz Danindra, "Analisis Faktor-Faktor Pengangguran di Provinsi Banten 2015-2016," *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Vol. 3, No. 5, (Mei 2022), h. 139.

Berdasarkan grafik diatas merupakan grafik tingkat pengangguran terbuka menurut provinsi di Indonesia. Terlihat bahwa Provinsi Banten menjadi provinsi dengan tingkat pengangguran yang tinggi dibandingkan provinsi lainnya. Provinsi Banten memiliki tingkat pengangguran tertinggi pada Februari sebesar 7,97%, pada Agustus sebesar 7,52%. Provinsi Banten memiliki tingkat pengangguran terbuka teratas di Indonesia yang disebabkan oleh jumlah penduduk yang padat dan posisinya sebagai pusat pemerintahan, sekolah, dan industri, adanya persaingan yang ketat untuk mendapatkan pekerjaan.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat pengangguran diantaranya adalah pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan perluasan angkatan kerja dan upah, di beberapa tempat anak-anak muda mulai bekerja, tetapi mereka kurang berkonsentrasi pada pekerjaannya.¹⁰ Tantangan saat ini di seluruh dunia adalah meningkatkan kesempatan kerja kaum muda. Namun, banyak yang percaya bahwa upah harus diupayakan dan sesuai dengan regional, karena jika tidak maka orang biasanya akan malas bekerja.¹¹ Tingkat upah yang tinggi menyebabkan biaya tinggi,

¹⁰ Adriyanto, Didi Prasetyo, dan Rosmiyati Khodijah, "Angkatan Kerja dan Faktor Yang Mempengaruhi Pengangguran," *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Sosial*, Vol. 11 No. 2 (Oktober 2020) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sriwijaya, h. 67.

¹¹ Setiawan Khoirul, Mohammad Haikal, Adholf Galih Wicaksana, dan Deris Dermawan, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Banten 2017-2021," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi (JURRIE)*, Vol.2 No.1 (April, 2023) h.111.

sehingga bisnis cenderung mengurangi jumlah karyawan mereka untuk mengurangi biaya tersebut. Tenaga kerja sangat bergantung pada besaran upah yang dibagikan oleh perusahaan menjadi sumber kebutuhan hidup mereka dan keluarga.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pengangguran yaitu upah. Upah minimum adalah sebuah perdebatan, bagi yang mendukung kebijakan tersebut mengemukakan bahwa upah minimum diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pekerja agar sampai pada tingkat pendapatan sesungguhnya yang berarti bahwa orang yang bekerja akan mendapatkan pendapatan yang layak untuk hidupnya.¹² Banten adalah salah satu provinsi di Indonesia yang mengalami pertumbuhan ekonomi pesat yang didukung oleh industri, perdagangan, dan jasa. Lokasinya yang strategis dekat dengan DKI Jakarta membuat Banten sebagai area industri penting dengan banyak pabrik dan perusahaan besar. Namun, peningkatan ekonomi yang cepat tidak selalu berarti kesejahteraan yang sama, seperti yang ditunjukkan oleh tingkat pengangguran.

Di Provinsi Banten, upah minimum memiliki implikasi yang signifikan terhadap dinamika ketenagakerjaan, khususnya terhadap tingkat pengangguran terbuka. Ketenagakerjaan saling berhubungan dengan

¹² Rastri Paramita, "Menilik Upah Minimum dan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia," *Jurnal Budget*, Vol. 6 No. 2 (2021), h.27.

kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah mengenai upah minimum. Kebijakan ini berfungsi sebagai jaring pengaman sosial untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Penetapan jumlah upah yang dilakukan oleh pemerintah tentu saja menyebabkan pengaruh tingginya tingkat pengangguran yang terjadi. Sehingga jumlah upah yang besar yang harus dibayarkan perusahaan mengakibatkan meningkatnya jumlah pengangguran di suatu wilayah.¹³

Setiap kenaikan tingkat upah akan diikuti oleh turunnya tenaga kerja yang diminta, yang berarti akan menyebabkan bertambahnya pengangguran.¹⁴ Demikian pula sebaliknya dengan turunnya tingkat upah maka akan diikuti oleh meningkatnya penyerapan tenaga kerja, sehingga dapat dikatakan bahwa jumlah tenaga kerja yang terserap mempunyai hubungan timbal balik dengan tingkat upah. Upah yang dibayarkan dianggap sebagai biaya produksi, dan kenaikan upah akan berdampak pada penurunan permintaan kerja.

Pekerja yang menetapkan tingkat upah minimum pada tingkat upah tertentu, jika seluruh upah yang ditawarkan besarnya di bawah tingkat upah

¹³ Aruan, N. L., dan Sriyono.D, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun 1985-2011," *Modus Journal*, Vol. 26 No. 2 (2014) Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, h, 2020

¹⁴ Adenata Putra Dyto, dikutip dalam Alghofari, "Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum Kota-Kabupaten dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Pengangguran Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2010-2014," *Jurnal Ilmiah*.(2010) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, h. 3.

tersebut, seseorang akan menolak mendapatkan upah tersebut dan akibatnya menyebabkan pengangguran. Jika upah yang ditetapkan pada suatu daerah terlalu rendah, maka akan menyebabkan pengangguran di daerah tersebut. Namun dari sisi pengusaha, jika upah meningkat dan biaya yang dikeluarkan cukup tinggi, maka pengangguran akan berkurang.¹⁵

Upah mempunyai dampak terhadap jumlah angkatan kerja yang bekerja. Jika semakin tinggi tingkat upah yang ditetapkan, maka berpengaruh pada meningkatnya biaya produksi, akibatnya untuk melakukan efisiensi, perusahaan terpaksa melakukan pengurangan tenaga kerja, yang berakibat pada tingginya pengangguran.¹⁶ Hubungan antara upah minimum dan tingkat pengangguran yaitu semakin tinggi upah yang ditetapkan oleh pemerintah, semakin sedikit orang yang bekerja.¹⁷ Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa ketika upah minimum ditetapkan lebih tinggi, perusahaan menggunakan tenaga kerja yang lebih sedikit, sedangkan ketika upah minimum ditetapkan lebih rendah, perusahaan menggunakan lebih

¹⁵ Yetty dan Resmiyari Ansar, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Upah Minimum terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Maluku Utara," *Journal Of Fiscal and Regional Economy Studies*, Vol. 2 No. 1 (2019) Ekonomi Pembangunan Universitas Khairun, h. 39.

¹⁶ Radewa Rizki Mirma Wijaya, "Pengaruh Upah Minimum, PDRB, dan Populasi Penduduk Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (Studi Kasus Gerbangkertasusila Tahun 2007-2012)," *Jurnal Ilmiah*, Vol. 2 No. 1 (2014) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, h. 28.

¹⁷ Indra Suhendra dan Bayu Hadi Wicaksono, "Tingkat Pendidikan, Upah, Inflasi, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran di Indonesia," *Jurnal Ekonomi-Qu*, Vol. 6 No. 1 (April, 2016) Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, h. 3.

banyak tenaga kerja sehingga mereka dapat menghasilkan lebih banyak tenaga kerja.

Teori ini diperkuat dengan hasil Penelitian Kuntiarti (2018) menunjukkan bahwa upah minimum berdampak negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka, yang berarti jika upah minimum naik maka akan berdampak pada penurunan tingkat pengangguran terbuka. Namun, temuan ini bertentangan dengan temuan Padel & Suman (2017), yang menemukan bahwa hubungan antara kebijakan upah minimum dan tingkat pengangguran terbuka adalah positif. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah pengangguran terbuka meningkat seiring dengan peningkatan upah minimum.

Masalah tingkat pengangguran terbuka juga berkaitan dengan tingkat investasi. Investasi merupakan biaya investasi untuk perolehan fasilitas produksi yang meningkatkan kapasitas produksi barang dan jasa dalam perekonomian.¹⁸ Menurut teori Harrod-Domar, investasi merupakan kondisi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang stabil dalam jangka panjang. Mendorong investasi yang tepat melalui penanaman modal dalam negeri dapat mengurangi pengangguran. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) meningkatkan

¹⁸ Tiara Ayu Kusumaningtyas, "Pengaruh PMDN dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka melalui Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Banten," *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, Vol. 4 No. 5 (2023), h. 38.

pertumbuhan dunia usaha atau penciptaan industri dan memberikan masukan teknologi berupa produksi atau mesin yang menciptakan lapangan kerja dan pada akhirnya mengurangi pengangguran.¹⁹

Kegiatan penanaman modal akan membutuhkan lebih banyak input produksi, seperti tenaga kerja, sehingga penyerapan tenaga kerja akan meningkat dan kemungkinan dapat mengurangi pengangguran.²⁰ Ketika investasi lebih besar, ada kemungkinan lebih besar bahwa jumlah tenaga kerja yang digunakan dalam produksi barang dan jasa akan meningkat. Ini berarti bahwa ada kemungkinan lebih banyak lapangan kerja akan diciptakan.²¹

Jika nilai realisasi investasi tinggi maka mendorong terciptanya peluang usaha baru sehingga mengurangi pengangguran yang ada.²² Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Provinsi Banten mengalami fluktuatif artinya mengalami kenaikan dan penurunan. Saat ini tingkat investasi yang tinggi dan berkembangnya berbagai lapangan pekerjaan tidak

¹⁹ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013), h. 220

²⁰ Reni Helvira dan Endah Putria Rizki, "Pengaruh Investasi, Upah Minimum, dan IPM terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Kalimantan Barat," *E-Jurnal IAIN Pontianak*, Vol. 1 No. 1 (2020) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pontianak, h. 56.

²¹ Linda Wahyuni dan Murtala, "Pengaruh Inflasi, Produk Domestik Regional Bruto dan Investasi terhadap Pengangguran Terdidik di Provinsi Aceh," *Jurnal Ekonomika Indonesia*, Vol. VIII No. 2 (Desember, 2019) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh, h. 2.

²² Zila Anggraini, "Analisis Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019," *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)*, Vol. 5 No. 4 (2021), h. 713.

sebanding dengan angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan. Perusahaan yang berinvestasi dan mendirikan lapangan usaha akan menyerap pengangguran.

Dilihat oleh hasil penelitian Ziddan dan Sakti (2022) yang menyatakan bahwa investasi secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Ini berarti bahwa ketika jumlah investasi tinggi, tingkat pengangguran juga tinggi, karena investor tertarik pada sektor padat modal untuk menanamkan modal pada industri-industri yang menghasilkan keuntungan yang besar, sehingga penyerapan tenaga kerja harus memenuhi persyaratan.

Penelitian oleh Helvira dan Rizky (2020), dalam penelitiannya bahwa investasi secara parsial berpengaruh positif tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka.²³ Penelitian lainnya juga yaitu penelitian oleh Sudarsana & Sucitrawati (2013), yang mengemukakan bahwa investasi berpengaruh terhadap tingkat penganggura terbuka.²⁴

Berdasarkan permasalahan tersebut, oleh karenanya peneliti dapat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Upah Minimum Kab/Kota (UMK) dan Penanaman Modal Dalam Negeri**

²³ Helvira Reni dan Endah Putria Rizky, “Pengaruh Investasi, Upah Minimum dan IPM terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Kalimantan Barat,” *Journal Islamic Of Economics and Business*, Vol. 1 No.1 (2020), h. 5.

²⁴ Sucitrawati Ni Putu dan Sudarsana Arka, “Pengaruh Inflasi, Investasi dan Tingkat Upah terhadap Tingkat Pengangguran di Bali,” h. 53.

(PMDN) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Banten Tahun 2020-2023”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas maka dapat diperoleh identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Provinsi Banten memiliki tingkat pengangguran terbuka teratas di Indonesia yang disebabkan oleh jumlah penduduk yang padat dan adanya persaingan yang ketat untuk mendapatkan pekerjaan dalam beberapa waktu terakhir.
2. Penetapan jumlah upah yang dilakukan oleh pemerintah di Provinsi Banten mengalami peningkatan namun setiap kenaikan tingkat upah akan diikuti oleh turunnya tenaga kerja yang diminta, yang berarti akan menyebabkan bertambahnya pengangguran.
3. Penanaman modal dalam negeri tiga tahun terakhir di Provinsi Banten mengalami peningkatan. Saat ini tingkat investasi yang tinggi dan berkembangnya berbagai lapangan pekerjaan tidak sebanding dengan angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan.

C. Batasan Masalah

Batasan masalah untuk menghindari kesalahan dan pelebaran pokok permasalahan agar lebih sistematis dan memudahkan pokok bahasan. Maka

dari itu, peneliti membatasi penelitian “Pengaruh Upah Minimum dan Penanaman Modal Dalam Negeri terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Banten pada tahun 2020-2023” adapun upah minimum yang diteliti dibatasi khususnya pada upah minimum kabupaten/kota dan penanaman modal dalam negeri terhadap tingkat pengangguran terbuka.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, masalah yang akan dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh upah minimum kabupaten/kota (UMK) terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten periode 2020-2023?
2. Bagaimana pengaruh penanaman modal dalam negeri (PMDN) terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten periode 2020-2023?
3. Bagaimana pengaruh upah minimum kabupaten/kota (UMK) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten periode 2020-2023?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulisannya penelitian yang akan dicapai adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh upah minimum kabupaten/kota (UMK) terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten periode 2020-2023
2. Untuk menganalisis pengaruh penanaman modal dalam negeri (PMDN) terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten periode 2020-2023
3. Untuk menganalisis pengaruh upah minimum kabupaten/kota (UMK) dan penanaman modal negeri (PMDN) terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten periode 2020-2023

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis. Adapun beberapa manfaat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi dan pemahaman mengenai UMK dan PMDN terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten. Dengan hasil yang ada, diharapkan dapat menambah khasanah ilmu ekonomi dan memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan yaitu dapat menjadi referensi bagi penulis karya ilmiah yang sejenis di masa yang akan

datang.

2. Manfaat Secara Praktis

Manfaat secara praktis dapat disebut sebagai pemahaman yang akan di gunakan secara praktik di lapangan dari adanya manfaat secara praktik di lapangan dari adanya manfaat secara teoritis baik dari penulis maupun pembaca.

a. Bagi Pemerintah

Penelitian dapat dijadikan rekomendasi kepada pemerintah agar dapat dapat menentukan kebijakan yang tepat untuk melakukan pengembangan potensi-potensi yang ada di Provinsi Banten mengingat besarnya potensi dan peluang yang dimiliki oleh Provinsi Banten dan apabila dikembangkan akan menjadikan penghasilan utama.

b. Bagi Masyarakat

Wilayah Banten agar dapat memberikan wawasan untuk dijadikan pertimbangan dnegan mleihat peluang.

c. Bagi Investasi/Pengusaha

Hasil penelitian ini dapat menjadikan pengetahuan, saran dan tantangan bagi para pengusaha agar dapat mempertahankan investasi dan meningkatkan tingkat investasi khususnya pada penanaman modal dalam negeri.

d. Bagi Akademisi

Memberikan hasil pemikiran serta tambahan pengetahuan di bidang upah minimum dan penanaman modal dalam negeri terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Banten.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Adapun hasil penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1

Persamaan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama/Judul/ Tahun	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	Peneliti : Risen A. Sambaulu, Tri Oldy Rotinsulu, Agnes Lutherani Ch.P Lapien	Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk secara parsial berpengaruh	Lokasi penelitian ini di lakukan dikota Manado dengan variabel jumlah penduduk (x1),	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dan menggunakan regresi linier

	<p>(2022)</p> <p>Judul :</p> <p>“Pengaruh Jumlah Penduduk, Upah Minimum dan Inflasi terhadap Pengangguran di Kota Manado”</p>	<p>positif dan signifikan terhadap pengangguran, upah minimum dan inflasi secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran.²⁵</p> <p>Secara simultan jumlah penduduk, upah minimum dan inflasi berpengaruh</p>	<p>upah minimum (x2) dan pengangguran (Y)</p>	<p>berganda.</p>
--	---	--	---	------------------

²⁵ Risen A. Sambulu, Tri Oldy Rotinsulu dan Agnes Luthaerani Ch. P. Lopian, “Pengaruh Jumlah Penduduk, Upah Minimum dan Inflasi Terhadap Pengangguran di Kota Manado,” *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 22 No. 6 (Agustus, 2022) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado, h. 37.

		terhadap pengangguran.		
2	Peneliti : Jihad Lukis Panjawa dan Daryono Soebagito (2014) Judul : “Efek Peningkatan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran”	Hasil penelitian membuktikan bahwa upah minimum dan jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap pengangguran, inflasi tidak memiliki pengaruh terhadap pengangguran. ²⁶	Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Surakarta. Menggunakan tujuh kabupaten/kota runtut waktu selama 15 tahun	Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif, data yang digunakan data sekunder, teknik analisis yaitu regresi data panel. Memiliki hanya variabel X dan Y.

²⁶ Jihad Lukis Panjawa dan Daryono Soebagito, “Efek Peningkatan Upah Minimum terhadap Tingkat Pengangguran,” *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Vol. 15 No. 1 (April 2014) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta, h. 49.

3	<p>Peneliti: Tiara Ayu Kusumaning tyas dan Muchtolifah (2023) Judul : “Pengaruh PMDN dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka melalui Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Banten”.</p>	<p>Hasil penelitian menyimpulkan bahwa secara parsial PMDN dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka secara langsung, sedangkan pengeluaran pemerintah secara langsung</p>	<p>Metode analisis <i>Path Analysis</i> dan disertai uji sobel. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa <i>time</i> <i>series</i> dalam kurun waktu tahun 2007 hingga 2021</p>	<p>Metode kuantitatif, data sekunder berbentuk time series yang diperoleh dari dokumen atau publikasi pada website.</p>
---	--	--	--	---

		berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka. ²⁷		
4	Peneliti : Ameilia Karisma, Wasmodo Tjipto Subroto, dan Hariyati (2021) Judul : “Pengaruh Pendidikan dan Investasi terhadap Pengangguran	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pendidikan dan investasi yang terdiri dari penanaman modal asing tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap	Lokasi penelitian di pulau jawa, periode yang membedakannya yaitu 2015-2017, variabel bebas seperti pendidikan yang menjadi pembeda.	Metode kuantitatif, analisis yang digunakan regresi linier berganda, data panel

²⁷ Tiara Ayu Kusumaningtyas dan Muchtolifah, “Pengaruh PMDN dan Pengeluaran Pemerintah dan Tingkat Pengangguran Terbuka Melalui Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Banten,” *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, Vol. 4 No. 5 (2023) Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, h. 7210.

	di Jawa”	pengangguran dan sedangkan investasi yang terdiri dari penanaman modal dalam negeri memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pengangguran. 28		
5	Peneliti : Reni Helvira dan Endah Putria Rizki (2020)	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi, upah	Lokasi yang peneliti gunakan untuk melakukan penelitian ini	Menggunakan data sekunder, dan regresi data panel. Jenis data yang

²⁸ Amelia Karisma, Waspodo Tjipto Subroto, dan Hariyati, “Pengaruh Pendidikan Terhadap Pengangguran di Jawa,” *Journal of Economic, Business dan Accounting*, Vol. 5 No. 1 (Desember, 2021) Universitas Negeri Surabaya, h. 441.

	<p>Judul : “Pengaruh Investasi, Upah Minimum dan IPM terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Kalimantan Barat”</p>	<p>minimum dan indeks indeks pembangunan manusia secara bersamaan (bersama-sama) secara signifikan mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka di Barat kalimantan.²⁹</p>	<p>yaitu di kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat dan Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat.</p>	<p>digunakan dalam penelitian ini adalah data <i>time series</i> dan <i>cross section</i>.</p>
--	---	--	---	---

H. Kerangka Pemikiran

Permasalahan di dunia, baik negara maju maupun negara sedang berkembang, selalu menghadapi masalah pengangguran. Namun, negara

²⁹ Reni Helvira dan Endah Putria Rizki, “Pengaruh Investasi, Upah Minimum dan IPM Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Kalimantan Barat,” *Journas Islamic School Economics Business*, Vol. 1 No. 1 (2020), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pontianak, h. 53.

berkembang tidak mampu memberikan tunjangan kepada warganya yang menganggur, sedangkan negara maju mampu.³⁰ Mereka yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak mencari pekerjaan disebut pengangguran. Penurunan produktivitas perekonomian, yang menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK), penurunan tingkat keterampilan masyarakat, kurangnya penyerapan tenaga kerja, dan sebagainya adalah beberapa penyebab umum pengangguran.³¹ Ketidakseimbangan antara jumlah orang yang berada dalam angkatan kerja atau yang telah memasuki fase usia produktif (sekitar 15 hingga 64 tahun) yang siap untuk bergabung dalam ruang lingkup pekerjaan dan jumlah peluang pekerjaan yang tersedia biasanya menjadi penyebab situasi ketidakpekerjaan ini. Kondisi ini menyebabkan angkatan kerja yang buruk. Orang-orang yang termasuk dalam populasi yang bekerja tidak dapat diserap sepenuhnya dalam lapangan kerja saat ini.³²

³⁰ Trianggono Budi Hartanto dan Siti Umajah Masjkuri, "The Effect Of Population, Education, Minimum Wage and Gross Regional Domestic Product On The Amount Of Unemployment In The Regency and City Of East Java, 2010-2014," *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, Vol. 2 No. 1 (2021) Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga, Indonesia, h. 20-29.

³¹ Muhamad Ferdy Firmansyah, Haikal Zulian Maulana, Zahra Firdausa Sunarya, dan Fatimah Zahra Nasution, "Pengaruh Penanaman Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya terhadap Pengangguran serta Lingkungan Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, Vol. 20 No. 2 (2023) Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi, h. 13.

³² Bagus Mulya Pratama, Tri Indah Fadhila Rahmah dan Budi Dharma, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Angkatan kerja, Indeks Pembangunan Manusia dan Upah Minimum terhadap Tingkat Pengangguran Di kota Medan," *Management Studies*

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka beberapa diantaranya yaitu upah minimum kabupaten/kota dan investasi. Upah minimum adalah batas minimum yang dapat diterima oleh perusahaan untuk membayar pekerja atau buruh mereka yang menjadi kebijakan pengupahan yang diatur oleh pemerintah.³³ Upah mempengaruhi jumlah tenaga kerja di suatu negara, jika upah minimum di suatu wilayah tinggi, tenaga kerja akan lebih tertarik untuk mencari pekerjaan karena penawaran upah yang lebih besar yang akan mengurangi tingkat pengangguran.³⁴ Upah minimum yang terlalu tinggi, perusahaan harus mengefisienkan biaya produksinya untuk menyeimbangkan pendapatannya. Jika perusahaan mengefisienkan produksinya, otomatis pengurangan pegawai atau PHK, yang mengakibatkan pengangguran.³⁵

Upah minimum di kabupaten dan kota Banten terus meningkat, dimana hal ini dapat menyebabkan lebih banyak pekerja yang dipekerjakan

and Entrepreneurship Journal, Vol. 5 No. 1 (2024) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, h. 1384.

³³ Devanto Shasta Pratomo dan Putu Mahardika Adi Saputra, "Kebijakan Upah Minimum Untuk Perekonomian yang Berkeadilan : Tinjauan UUD 1945," *Journal of Indonesian Applied Economic*, Vol. 5 No. 2 (Oktober, 2011) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, h. 270.

³⁴ Silvia Luthfiyah Ghinastri dan Wildan Syafitri, "Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Kemiskinan," *Journal of Development Economic and Social Studie*, Vol. 3 No. 1 (2024) Fakultas ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, h. 74.

³⁵ Silvia Luthfiyah Ghinastri dan Wildan Syafitri, "Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Kemiskinan," *Journal Of Development Economic and Social Studies*, Vol. 3 No. 1 (2024) Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, h.74.

dan lebih sedikit yang dipekerjakan.³⁶ Peningkatan upah minimum yang stabil akan memungkinkan perusahaan, sektor ekonomi, dan masyarakat untuk meningkatkan aktivitas usaha dan mengembangkan usahanya. Ketika usaha yang ada meningkat dan berkembang, perusahaan atau usaha dapat membantu penyerapan tenaga kerja, yang pada gilirannya dapat mengurangi pengangguran.³⁷

Faktor lainnya yaitu investasi yang memiliki keterkaitan dengan pengangguran terbuka, disebabkan oleh beberapa faktor bahwa jumlah angkatan kerja lebih besar dari pada jumlah lapangan kerja yang tersedia dalam perekonomian. Pemerintah Indonesia sangat memperhatikan penanaman modal dan kebijakannya banyak berfokus pada pengembangan penanaman modal secara masif.³⁸ Investasi juga dapat didefinisikan sebagai dana yang dialokasikan oleh individu, pengusaha, atau pemerintah untuk membeli barang modal atau peralatan produksi dengan tujuan meningkatkan

³⁶ Widyah Khirun Nisa, "Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pengangguran Pada Daerah TPT Tinggi dan Daerah TPT Rendah (Studi pada 38 Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2015)," *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang, h. 5.

³⁷ Irfan Muhammad Al Farrell dan Hastarini Dwi Atmanti, "Analisis Pengaruh Tingkat Upah, Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja dan Pendidikan terhadap Tingkat Pengangguran (Studi Kasus 34 Provinsi di Indonesia)," *Business Economic Entrepreneurship*, Vol. VI No. 2 (Juli, 2023) Ilmu Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, h.135.

³⁸ Shem Dwi Nehemia dan Ferry Prasetya, "Analisis Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Indonesia," *Journal Of Development Economic and Social Studies*, Vol. 2 No. 1 (2023) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, h. 27.

produksi di masa mendatang dengan mengganti atau menambah barang modal tersebut.³⁹

Penanaman modal atau investasi di Indonesia akan menciptakan lapangan kerja baru, transfer teknologi baru, meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak, membantu orang memenuhi kebutuhan hidup mereka, dan mendorong pertumbuhan produsen nasional.⁴⁰ Meningkatkan jumlah lapangan kerja melalui investasi adalah bagian penting dari upaya untuk mengurangi pengangguran.

Pengeluaran pengusaha dari investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) dapat didefinisikan sebagai investasi, yang digunakan untuk membeli barang modal dan peralatan produksi untuk meningkatkan kemampuan barang dan jasa di Kabupaten atau Kota.⁴¹ Besar kecilnya investasi yang dilakukan di masyarakat akan sangat mempengaruhi jumlah kesempatan kerja yang diciptakan di dalamnya. Investasi akan meningkatkan kegiatan produksi,

³⁹ Elif Pardiansyah, "Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam : Pendekatan Teoritis dan Empiris," *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8 No. 2 (2017) Universitas Indonesia Jakarta, h. 340.

⁴⁰ Ni Made Budi Kartika, Desak Gde Dwi Arini, dan Luh Putu Suryani, "Implikasi Penanaman Modal Dalam Negeri terhadap Tingkat Pengangguran Di Kawasan Pariwisata Candidasa Karangasem," *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2 No. 1 (Februari, 2021) Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar Bali, h. 73-77.

⁴¹ Edah Jubaedah dan Anita Amelia, "Identifikasi Faktor Penentu Perubahan Tingkat Pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Banten," *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi*, Vol. 1 No. 3 (2021) Universitas Nurtanio, h. 141-150.

yang akan membuka kesempatan kerja baru. Jumlah pengangguran akan berkurang karena munculnya kesempatan kerja baru.

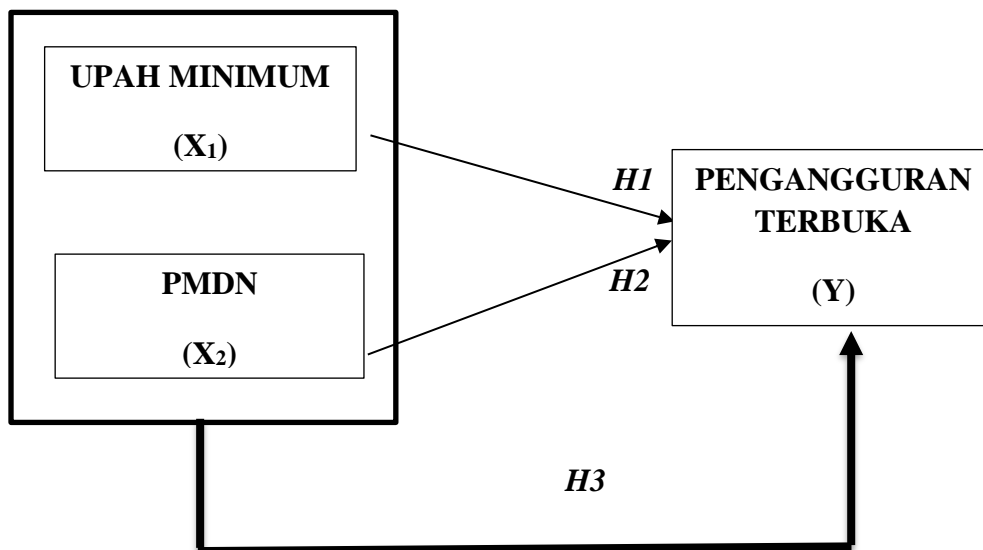
Penggunaan kekayaan untuk menjalankan bisnis, baik secara langsung maupun tidak langsung, dikenal sebagai penanaman modal dalam negeri akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kesempatan kerja, dan pendapatan nasional.⁴² Indikator bagi para investor dalam negeri dan asing untuk menilai apakah perekonomian negara tempat mereka berinvestasi sehat atau tidak. Ketika investasi tinggi, pengangguran juga tinggi, ini karena para investor tertarik pada sektor padat modal untuk menanamkan modal pada industri-industri yang memiliki keuntungan yang besar, sehingga penyerapan tenaga kerja harus memenuhi persyaratan khusus untuk kesempatan kerja. Tingkat pengangguran juga menunjukkan seberapa stabil perekonomian negara tersebut sehingga investor dalam negeri dan asing tertarik untuk berinvestasi.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas yang menjelaskan bahwa upah minimum dan penanaman modal dalam negeri saling keterkaitan terhadap tingkat pengangguran terbuka maka dapat digambarkan sebagai berikut :

⁴² Ameilia Karisma, Waspodo Tjipto Subroto, dan Hariyati, "Pengaruh Pendidikan dan Investasi terhadap Pengangguran Di Jawa," *Journal Of Economic, Business and Accounting*, Vol. 5 No. 1 (Desember, 2021) Universitas Negeri Surabaya, h. 444.

Tabel 1.2

Kerangka Pemikiran



I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini mengarah kepada maksud yang sesuai dengan judul, maka pembahasan ini penulisan disusun menjadi lima bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan akan latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka berfikir dan sistematika pembahasan.

BAB II : KAJIAN TEORITIS

Pada bab ini berisi landasan teori-teori sebagai hasil dari studi

pustaka dan pemikiran yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan dengan menjelaskan pengaruh upah minimum dan penanaman modal dalam negeri terhadap tingkat pengangguran terbuka tahun 2020-2023. Teori yang didapat menjadi landasan pendukung mengenai masalah yang diteliti oleh penulis, hubungan antar variabel dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan metodologi penelitian yang dikembangkan berdasarkan pokok masalah utama untuk memperoleh hasil dan tujuan yang diinginkan. Menguraikan tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, variabel penelitian, jenis metode penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang menguraikan hasil analisis dari pengolahan data yang telah dilakukan beserta analisa dan menjelaskan gambaran umum objek penelitian dan hipotesis akan dijelaskan pada bagian ini.

BAB V : PENUTUP

Berisi kesimpulan dari penelitian berdasarkan analisis data yang telah diolah dan telah dibahas pada bagian sebelumnya dan juga saran sebagai pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.